

BAB I

PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Begitu banyak persoalan yang pasti dihadapi oleh sebuah negara berkembang. Salah satu persoalan tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan memang tidak mudah untuk dijelaskan karena terdapat berbagai konsep, pengertian dan tolak ukur yang dipergunakan oleh banyak para ahli. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) mendefinisikan Kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Secara sederhana pemahaman mengenai kemiskinan dapat kita artikan dengan kondisi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok diri ataupun keluarganya baik secara pangan maupun non-pangan.

Kemiskinan juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan karena sebuah negara bisa dikategorikan sebagai negara yang sejahtera apabila mampu menekan angka kemiskinan. Kemiskinan juga selalu berjajar lurus dengan ketidakberdayaan, minimnya akses pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwasanya kemiskinan telah menyebabkan jutaan orang tidak bisa mengakses pendidikan, kesulitan dalam membiayai kesehatan bahkan banyak permasalahan - permasalahan lain yang mendorong kearah tindakan kejahatan.

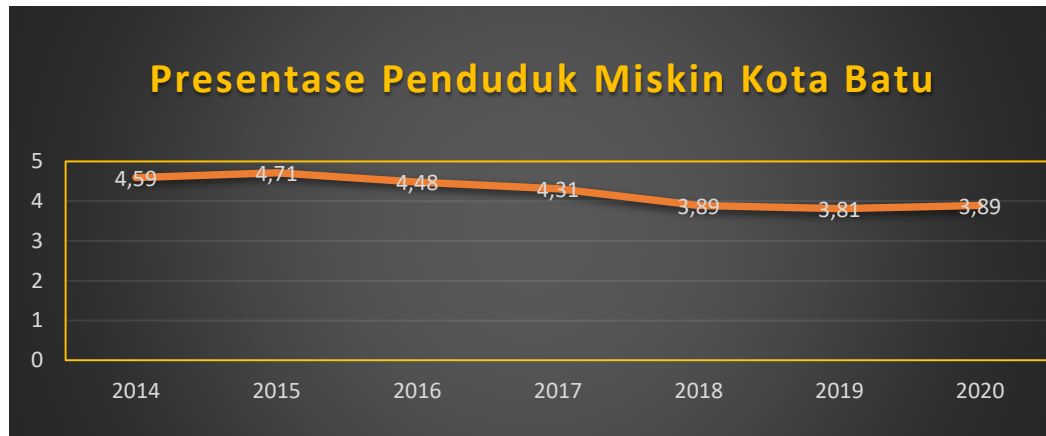
Terlebih dalam masa Pandemi Virus COVID – 19 yang telah melanda hampir seluruh penjuru dunia tak terlewat juga negara Indonesia, tentunya banyak dampak yang dihasilkan dari terjadinya pandemi ini yang pasti berpengaruh secara signifikan pada berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor perekonomian yang berdampak cukup parah dan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan juga membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi covid – 19 ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dimana secara presentase penduduk miskin pada bulan Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen. Jika dibandingkan pada bulan yang sama ditahun sebelumnya yaitu pada Maret 2020 maka tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 1,2 juta orang atau sebesar 0,36 persen dari total penduduk di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin Kota Batu , pada tahun 2020 sebanyak 8,12 ribu orang atau secara presentase sebesar 3,89 persen dari total penduduk yang ada di Kota Batu. Setiap tahun presentase jumlah penduduk miskin di Kota Batu juga selalu mengalami perubahan baik penurunan maupun peningkatan berikut adalah presentase perkembangan pada tahun 2014 – 2020.

Gambar 1

Perkembangan Presentase Penduduk Miskin Kota Batu 2014 – 2020



Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik (2020)

Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan diwujudkannya dalam sebuah bentuk program bantuan sosial.

Sebagaimana dinyatakan oleh Indra Bastian (2016 : 196) bahwa Perlindungan Sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/ bantuan hukum.

Dimana program bantuan sosial ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi beban dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan pangan. Program ini bernama Bantuan Pangan Non Tunai yang disingkat dan dikenal dengan BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyelur.

Program ini juga diharapkan dapat memberi kebebasan kepada keluarga penerima manfaat pada proses pemilihan jenis - jenis bahan pangan dan harga yang sesuai dengan keinginan mereka. Di Kota Batu dalam proses penyalurannya Bantuan Pangan Non Tunai telah melakukan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Awal mula dari Program BPNT ini pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 26 April 2016 dengan dilakukanya Rapat Terbatas mengenai program bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dimana pada rapat tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan direalisasikan diberbagai daerah pada tahun 2017 tepatnya di 44 kota yang sudah memiliki akses dan fasilitas yang memenuhi kriteria.

Dimana Kota Batu menjadi salah satu dari daerah tersebut ,yang tentunya secara bertahap program BPNT ini dapat diperluas ke seluruh kota dan kabupaten. Melalui program ini pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan juga ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Sebagai dukungan proses pelaksanaan program BPNT tersebut , maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 , tentang penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai. Selain dasar hukum tersebut program BPNT juga memiliki dasar hukum di bawahnya yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang tentu bertujuan agar program dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam PERMENSOS ini terdapat mekanisme tahapan – tahapan yang harus di lalui, mulai dari registrasi serta pembukaan rekening bagi KPM, dilaksanakannya sosialisasi kepada para pihak terkait, pelaksanaan penyaluran yang berupa proses pembelian bahan pangan oleh KPM sampai pada tahap pengawasan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat data bahwa di Kota Batu terdapat jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 4.441 KPM reguler Program Bantuan Pangan Non Tunai. Tentu jumlah ini mengalami kenaikan pada situasi pandemi sebanyak 5.665 KPM terdampak pandemi COVID-19. Sehingga total dari KPM Program Bantuan Pangan Non Tunai berjumlah 10.106 di tahun 2020. Namun tentu perlu dipahami bahwasanya jumlah KPM dapat berubah dari waktu ke waktu karena data yang bersifat dinamis. Penambahan jumlah penerima yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 ini juga merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat. Tentu dari total jumlah penerima bantuan tersebut tidak semua dapat tersalurkan sesuai dengan harapan. Ada berbagai kendala atau permasalahan yang muncul di lapangan.

Berdasarkan dari informasi permasalahan yang sering terjadi adalah sistem error yang dialami oleh keluarga penerima manfaat dan ada juga yang tidak melakukan transaksi pengambilan. Tentu hal ini harus dicari tahu penyebabnya, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ada banyak kemungkinan penyebab dari hal tersebut, apakah tidak dilakunya pengambilan ini dikarenakan keluarga penerima merasa tidak membutuhkan yang berarti program BPNT masih belum sepenuhnya tepat sasaran, ketidak pahaman kelompok sasaran terhadap mekanisme program ataukah ada penyebab – penyebab lain yang harus dicari tahu kebenarannya dan menjadi perhatian khusus pihak – pihak terkait untuk segera ditemukan penyebab dan solusinya.

Maka dari penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan fokus Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 di Kota Batu , Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu ?
2. Apa saja faktor – faktor pendorong dan penghambat dari Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai
2. Untuk memahami faktor – faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dari implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menganalisa sebuah program dan implementasinya di dalam masyarakat.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi khususnya Pemerintahan Kota Batu tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan baik sosial maupun politik , melalui pendekatan ilmu kebijakan publik.